



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 7634-7640

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kepatuhan Pengungkapan Sustainability Reporting pada Sektor Perikanan Tahun 2022-2024 Berdasarkan Nomor 51/POJK.03/2017

Wa Ode Endiaverni

Program Studi S1-Akuntansi, Institusi Dharma Bharata Grup

endiaverni24@gmail.com

Abstrak

Penerapan visi ekonomi biru di Indonesia menuntut transparansi dan akuntabilitas aspek keberlanjutan yang tinggi, mengingat sektor perikanan memiliki dampak ekologis yang signifikan terhadap kelestarian ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keberlanjutan pada delapan perusahaan sub-sektor perikanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024, merujuk pada standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode content analysis, penelitian ini menerapkan teknik skoring dikotomi terhadap 27 indikator pengungkapan untuk menghasilkan Sustainability Report Disclosure Index (SRDI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren kepatuhan emiten selama periode pengamatan bersifat fluktuatif dan belum konsisten. Pada tahun awal pengamatan (2022), mayoritas perusahaan menunjukkan tingkat adaptasi yang rendah dengan skor pengungkapan mencapai 0%, menandakan adanya keterlambatan respons terhadap regulasi. Memasuki tahun 2023, terdapat lonjakan kepatuhan yang signifikan sebagai shock effect implementasi aturan, di mana emiten seperti CPRO dan CRAB berhasil mencapai tingkat pengungkapan penuh (100%). Namun, konsistensi ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 di beberapa emiten tertentu. Secara substansial, pengungkapan informasi administratif seperti profil perusahaan telah dilakukan dengan sangat konsisten, namun aspek krusial seperti kinerja lingkungan hidup dan verifikasi pihak independen masih sangat minim dilaporkan. Hasil ini memberikan implikasi penting bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk memperketat pengawasan serta bagi manajemen perusahaan untuk segera membangun sistem data non-keuangan yang terintegrasi demi menjaga legitimasi bisnis dan mendukung keberlanjutan ekonomi maritim di Indonesia.

Kata kunci: Kepatuhan, Sustainability Reportin, Ekonomi Biru, Sektor Perikanan, POJK 51/2017.

1. Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar fundamental dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini memegang peran strategis sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber devisa negara yang signifikan (Suwarno, E. et al., 2025) (Lindiawatie, 2025). Potensi sumber daya maritim yang melimpah ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam menggerakkan visi ekonomi biru (blue economy), sebuah konsep pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan laut. Implementasi visi ini menuntut adanya pengelolaan sumber daya yang transparan dan bertanggung jawab dari seluruh pemangku kepentingan, terutama perusahaan yang beroperasi di sektor perikanan karena aktivitas operasional perusahaan memiliki dampak langsung terhadap ekosistem laut (BAPPENAS, 2024) (Choiriah, S. et al., 2025).

Urgensi transparansi pengungkapan laporan keberlanjutan (sustainability reporting) bagi perusahaan sektor perikanan Indonesia kini semakin mendesak, seiring dengan performa ekspor yang impresif pada tahun 2025 yang mencapai USD 6,27 miliar atau tumbuh 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didominasi oleh komoditas utama seperti udang (USD 1,87 miliar), tuna-cakalang (USD 1,04 miliar), serta cumi-sotong-gurita (USD 889,73 juta) yang sangat diminati di pasar global seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa (KKP RI, 2026). Namun, di balik capaian neraca perdagangan yang surplus sebesar USD 5,60 miliar tersebut, perusahaan menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa ekspansi ekonomi ini tidak mengorbankan ekosistem laut, sehingga laporan keberlanjutan menjadi instrumen vital untuk memvalidasi kepatuhan terhadap standar lingkungan internasional (KKP RI, 2024).

Potensi ekonomi kelautan Indonesia memiliki nilai strategis dengan estimasi pendapatan nasional mencapai USD 171 miliar per tahun jika dikelola melalui eksplorasi yang bijaksana dan berkelanjutan (Sapanli, K. et al., 2018). Signifikansi sektor ini tercermin dari data historis yang menunjukkan bahwa output bidang kelautan pernah berkontribusi hingga 28,01% terhadap output nasional, dengan sumbangan PDB mencapai 30,32%. Namun,

adanya fluktuasi data dalam beberapa tahun terakhir di mana kontribusi bidang kemaritiman tercatat melandai di angka 11,31% pada tahun 2020 menandakan perlunya komitmen yang lebih serius dalam mengelola sumber daya laut (Lindiawatie, 2025). Dalam konteks ini, laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) menjadi sangat urgensi bagi perusahaan perikanan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan tetap selaras dengan konsep pembangunan kelautan yang bijaksana demi mewujudkan kesejahteraan bersama jangka panjang (Rahmayanti & Sari, 2023) (Warkula et al., 2025).

Pengungkapan laporan keberlanjutan yang transparan berperan sebagai jembatan untuk memvalidasi bahwa pemanfaatan kekayaan laut Indonesia tidak hanya mengejar target output ekonomi, tetapi juga menjaga fungsi ekologis laut secara konsisten (Utomo & Purbowati, 2019). Ketika kontribusi PDB sektor kemaritiman menunjukkan tren yang dinamis, perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai praktik bisnis perusahaan guna meyakinkan pemangku kepentingan bahwa penurunan atau stagnasi nilai ekonomi dapat dimitigasi melalui tata kelola yang bertanggung jawab. Dengan menyajikan data kinerja lingkungan dan sosial yang akurat, perusahaan perikanan dapat memperkuat legitimasi bisnis dalam mengeksplorasi potensi ekonomi kelautan yang masif, sekaligus memastikan bahwa eksploitasi sumber daya dilakukan secara terukur demi menjaga keberlangsungan pendapatan nasional di masa depan.

Menjawab kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons melalui penerbitan regulasi krusial yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Regulasi ini secara eksplisit mewajibkan emiten dan perusahaan publik, termasuk yang bergerak di sub-sektor perikanan, untuk menyusun dan mempublikasikan *sustainability report* yang komprehensif. Aturan ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Tujuan utama dari kewajiban pelaporan ini adalah untuk menjembatani informasi non-keuangan seperti dampak lingkungan dan sosial kepada investor dan publik. Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi, tidak hanya berdasarkan kinerja finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan (Alam & Yousuf, 2024).

Penelitian ini berfokus pada analisis yang spesifik pada perusahaan sub-sektor perikanan dalam periode pengamatan 2022-2024. Periode ini dipilih untuk mengevaluasi efektivitas regulasi pasca-implementasi penuh dan untuk menangkap dinamika kepatuhan perusahaan dalam menghadapi tuntutan ekonomi biru yang semakin intensif. Pemilihan batas akhir tahun 2024 juga didasarkan pada ketersediaan data empiris saat penelitian ini dilakukan pada awal tahun 2026. Mengingat proses audit dan mekanisme pelaporan perusahaan, laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) untuk tahun buku 2025 secara umum baru akan diterbitkan secara resmi oleh perusahaan pada bulan April 2026. Oleh karena itu, periode 2022 hingga 2024 merupakan rentang waktu paling mutakhir yang menyediakan data laporan keuangan dan non-keuangan yang komprehensif serta telah terverifikasi. Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat lintas sektor (Lindiawatie, 2025) (Fathia et al., 2025), penelitian ini mendalami karakter pengungkapan sektor perikanan yang memiliki ketergantungan tinggi pada sumber daya alam, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas POJK 51/2017 dalam mendorong akuntabilitas ekologis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengungkapan *sustainability reporting* pada perusahaan sektor perikanan berdasarkan standar POJK 51/2017 dengan menggunakan indeks *Sustainability Report Disclosure Index (SRDI)* (Sejati & Prastiwi, 2015). Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi regulator dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih adaptif, serta bagi manajemen perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan guna mencapai pertumbuhan bisnis jangka panjang yang selaras dengan prinsip ekonomi biru. Oleh karena itu, temuan penelitian ini akan memperkuat pemahaman mengenai efektivitas regulasi keuangan berkelanjutan di Indonesia dan menjadi masukan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif guna memastikan sektor perikanan tumbuh secara berkelanjutan, selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi biru.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengubah informasi kualitatif dalam dokumen perusahaan menjadi data kuantitatif melalui proses kodifikasi berdasarkan indikator standar yang telah ditetapkan. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan pada sub-sektor perikanan (*fisheries*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yakni: (a) Perusahaan sektor perikanan yang terdaftar di BEI selama periode 2022-2024; (b) Perusahaan menerbitkan Laporan Keberlanjutan atau Laporan Tahunan yang memuat bagian laporan keberlanjutan secara lengkap selama periode pengamatan; dan (c) Data

laporan tersedia secara publik melalui website BEI. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keberlanjutan atau laporan tahunan perusahaan. Periode pengamatan tahun 2022 hingga 2024 dipilih untuk melihat konsistensi kepatuhan perusahaan pasca pemberlakuan penuh kewajiban pelaporan keberlanjutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi Lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Mengingat posisi penelitian pada Januari 2026, data tahun 2022-2024 dianalisis secara penuh, sementara data tahun 2025 belum data yang dipublikasikan hingga batas waktu pengumpulan data.

Instrumen pengukuran kepatuhan disusun berdasarkan poin-poin pengungkapan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 Lampiran II, yang mencakup sembilan kategori utama: (1) Penjelasan Strategi Keberlanjutan; (2) Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Kinerja Ekonomi, Kinerja Sosial, Kinerja Lingkungan Hidup); (3) Profil Singkat Perusahaan; (4) Penjelasan Direksi; (5) Tata Kelola Keberlanjutan; (6) Kinerja Keberlanjutan; (7) Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada); (8) Lembar Umpan Balik (Feedback) untuk Pembaca (jika ada); dan (9) Tanggapan Emiten terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teknik skoring dikotomi untuk mengukur tingkat kepatuhan pengungkapan. Setiap item dalam instrumen penelitian diberikan skor 1 jika diungkapkan dan skor 0 jika tidak diungkapkan, yang kemudian diakumulasikan menjadi sebuah indeks kepatuhan.

Proses pengolahan data dimulai dengan menerapkan teknik skoring dikotomi, di mana setiap butir informasi yang diwajibkan oleh POJK No. 51/POJK.03/2017 diperiksa ketersediaannya. Dalam mekanisme ini, setiap item pengungkapan diberikan skor 1 jika perusahaan menyajikan informasi tersebut secara jelas, dan skor 0 jika informasi tersebut tidak ditemukan atau tidak diungkapkan oleh perusahaan. Pendekatan biner ini digunakan untuk meminimalisir subjektivitas peneliti serta memberikan gambaran yang tegas mengenai pemenuhan kewajiban pelaporan oleh perusahaan. Setelah seluruh item dalam instrumen penelitian dinilai, total skor yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan tidak langsung dianalisis sebagai angka mutlak, melainkan ditransformasikan menjadi sebuah indeks yaitu Sustainability Report Disclosure Index (SRDI). Transformasi ini dilakukan dengan membagi jumlah skor yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan dengan jumlah total item yang seharusnya diungkapkan menurut regulasi. Secara matematis, penghitungan ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$SRDI = \frac{\sum X_i}{n}$$

Keterangan

- SRDI : Indeks Pengungkapan Laporan Keberlanjutan
 $\sum X_i$: Jumlah total skor yang diperoleh perusahaan (akumulasi skor 1)
 n : Jumlah total item yang seharusnya diungkapkan sesuai standar POJK

Hasil dari penghitungan SRDI kemudian menghasilkan angka dalam rentang 0 hingga 1 yang mencerminkan rasio kepatuhan perusahaan. Angka indeks inilah yang kemudian menjadi data kuantitatif utama untuk dianalisis lebih lanjut secara longitudinal dari tahun 2021 hingga 2025. Dengan menggunakan format indeks ini, peneliti dapat melakukan perbandingan yang setara antar-perusahaan meskipun terdapat perbedaan jumlah item yang diungkapkan, sekaligus memetakan tren kenaikan atau penurunan kepatuhan perusahaan sektor perikanan terhadap standar laporan berkelanjutan sesuai di Bursa Efek Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Deskripsi Subjek dan Sampel Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perusahaan sub-sektor perikanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2022-2024. Berdasarkan kriteria *purposive sampling*, diperoleh delapan perusahaan yang memenuhi syarat, yaitu: PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk (ASHA), PT Toba Surimi Industries Tbk (CRAB), PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI), PT Central Proteina Prima Tbk (CPRO), PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT Era Mandiri Cemerlang Tbk (IKAN), PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA), dan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM). Total observasi selama tiga tahun adalah 24 sampel laporan (*sustainability report* atau *annual report*).

3.1.2 Analisis Kepatuhan Pengungkapan (SRDI) per Tahun

Berdasarkan analisis konten terhadap 27 item pengungkapan dari sembilan kategori utama yang diamanatkan dalam Lampiran II POJK 51/2017 (penjelasan strategi keberlanjutan; aspek ekonomi; aspek lingkungan hidup; aspek sosial; visi, misi, dan nilai keberlanjutan; identitas perusahaan; skala usaha; kegiatan usaha; keanggotaan; perubahan perusahaan; komitmen keberlanjutan; penerapan keuangan berkelanjutan, strategi pencapaian target; uraian tugas; pengembangan kompetensi; prosedur penerapan keberlanjutan; pemangku kepentingan; masalah yang dihadapi; membangun budaya keberlanjutan; kinerja ekonomi, kinerja sosial, kinerja lingkungan hidup; kinerja lingkungan yang bisnisnya berkaitan langsung; tanggung jawab pengembangan produk/ jasa berkelanjutan; verifikasi tertulis dari pihak independent jika ada, lembar *feedback* jika ada, dan tanggapan *feedback* tahun sebelumnya). Hasil perhitungan Sustainability Report Disclosure Index (SRDI) menunjukkan dinamika yang signifikan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Skor SRDI Emiten Sektor Perikanan 2022-2024

Kode Emiten	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
ASHA	0%	74%	70%
CRAB	0%	100%	100%
DSFI	0%	96%	96%
CPRO	0%	100%	100%
IHKP	0%	26%	26%
IKAN	0%	89%	0%
ISEA	0%	0%	89%
DPUM	100%	100%	0%

Sumber: Data Olahan (2026)

Data tahun 2022 menunjukkan bahwa sektor perikanan berada pada level kepatuhan minimal, yang mencerminkan sulitnya masa transisi regulasi bagi sebagian besar emiten. Perubahan drastis terjadi pada tahun 2023 melalui peningkatan skor SRDI yang tajam, dengan CRAB dan CPRO sebagai benchmark pengungkapan sempurna. Namun, hasil penelitian tahun 2024 menunjukkan adanya inkonsistensi pelaporan.

3.1.3 Analisis per Kategori Pengungkapan

Berdasarkan analisis konten terhadap sembilan kategori utama yang diamanatkan dalam Lampiran II POJK 51/2017, ditemukan adanya variabilitas kualitas pengungkapan yang substansial antar kategori. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor perikanan cenderung memilih item pengungkapan yang bersifat kualitatif-naratif dibandingkan data kuantitatif yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan yang kompleks.

Pertama, kategori Profil Perusahaan dan Penjelasan Direksi menempati urutan teratas dengan tingkat kepatuhan paling konsisten di antara perusahaan yang melapor. Hal ini disebabkan oleh karakteristik informasi dalam kategori ini yang bersifat administratif, seperti sejarah perusahaan, visi-misi keberlanjutan, dan pernyataan komitmen dari jajaran manajemen. Bagi perusahaan, kategori ini informasinya sudah tersedia secara internal dan tidak memerlukan biaya audit tambahan. Namun, pengungkapan yang dominan pada aspek ini cenderung bersifat normatif dan sering kali hanya menjadi sarana komunikasi pemasaran untuk membangun citra positif di mata publik tanpa dukungan data kinerja yang konkret.

Kedua, kategori Kinerja Lingkungan Hidup menjadi aspek yang paling minim diungkapkan, bahkan oleh perusahaan yang memiliki skor SRDI menengah. Mayoritas perusahaan mengabaikan detail penggunaan energi, intensitas emisi karbon dari operasional armada kapal, konservasi air, serta perlindungan biodiversitas laut. Rendahnya pengungkapan pada poin ini merupakan indikasi kuat bahwa sistem pelaporan internal perusahaan belum mampu melakukan kuantifikasi terhadap dampak lingkungan. Padahal, bagi sektor perikanan yang sangat bergantung pada kesehatan ekosistem laut, data mengenai limbah pengolahan ikan dan dampak penangkapan terhadap stok sumber daya hayati laut adalah informasi yang sangat krusial bagi investor yang berfokus pada prinsip *blue economy*.

Ketiga, kategori Verifikasi Pihak Independen menjadi titik terlemah dalam seluruh struktur laporan keberlanjutan sektor perikanan. Hampir seluruh sampel penelitian (kecuali CPRO dan CRAB) tidak menyertakan opini dari pihak eksternal terhadap laporan perusahaan. Ketiadaan verifikasi ini menimbulkan keraguan atas reliabilitas data

non-finansial yang disajikan. Dari perspektif akuntansi, laporan tanpa verifikasi memperlebar celah asimetri informasi dan meningkatkan risiko praktik *greenwashing*.

Keempat, kategori Kinerja Sosial dan Ekonomi, terdapat kecenderungan pengungkapan yang selektif. Perusahaan lebih memilih mengungkapkan program CSR yang bersifat filantropi (bantuan sosial atau donasi) dibandingkan pengungkapan mengenai pengembangan kompetensi nelayan, standar keselamatan kerja di laut, atau dampak ekonomi langsung bagi komunitas pesisir secara berkelanjutan. Ketimpangan pengungkapan antar kategori ini menegaskan bahwa mayoritas perusahaan sektor perikanan di Indonesia masih berada pada tahap kepatuhan formalitas (*symbolic compliance*) dan belum bergeser ke arah pengungkapan substansial yang mencerminkan integrasi nilai ESG ke dalam strategi bisnis inti perusahaan.

3.2 Diskusi

3.2.1 Fenomena *Shock Effect* dan Konsistensi Pelaporan

Hasil penelitian yang menunjukkan naiknya tingkat kepatuhan dari hampir 0% pada tahun 2022 menjadi mayoritas patuh pada tahun 2023 mencerminkan sebagai *shock effect* regulasi. Hal ini menjadi respons langsung terhadap penegakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. Rendahnya kepatuhan pada tahun 2022 mengindikasikan adanya masa transisi, namun memasuki tahun 2023, perusahaan melakukan penyesuaian guna menghindari sanksi atau teguran, yang berujung pada peningkatan skor SRDI secara kolektif dan signifikan.

Secara teoritis, dinamika ini dapat dijelaskan melalui sudut pandang Teori Legitimasi (Legitimacy Theory). Perusahaan melakukan pengungkapan informasi non-finansial bukan semata-mata karena dorongan internal untuk transparan, melainkan sebagai strategi untuk mendapatkan pengakuan sosial dan memenuhi standar legal formal demi mempertahankan "kontrak sosial" dengan masyarakat dan regulator. Dalam konteks ini, laporan keberlanjutan tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen legitimasi untuk menunjukkan bahwa perusahaan patuh pada hukum. Namun, efektivitas *shock effect* ini terbukti bersifat jangka pendek dan rentan terhadap inkonsistensi, sebagaimana terlihat pada data tahun 2024. Inkonsistensi yang ditunjukkan oleh perusahaan seperti IKAN dan DPUM pada tahun 2024 memberikan bukti empiris mengenai praktik *ceremonial compliance*. Ketika suatu perusahaan melaporkan informasi keberlanjutan secara lengkap di satu tahun (mencapai skor tinggi) namun menghentikannya di tahun berikutnya, hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai keberlanjutan belum terinternalisasi ke dalam strategi inti perusahaan.

Selain Teori Legitimasi, dinamika kepatuhan ini juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang Teori Sinyal (Signaling Theory). Teori ini menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keberlanjutan yang unggul akan cenderung memberikan sinyal informasi yang lebih berkualitas kepada pasar untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan eksternal. Dalam konteks sektor perikanan, pengungkapan laporan keberlanjutan yang konsisten dan komprehensif oleh perusahaan seperti CPRO dan CRAB berfungsi sebagai sinyal positif yang membedakan perusahaan dari perusahaan lain yang hanya melakukan kepatuhan formalitas. Sinyal ini sangat krusial untuk membangun kepercayaan investor global dan lembaga keuangan hijau, yang memungkinkan perusahaan mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah serta biaya modal yang lebih rendah melalui instrumen seperti *blue bonds* atau *green financing*.

3.2.2 Kendala Struktural dan Kapasitas Internal Emiten

Ketidakkonsistenan pengungkapan yang ditemukan pada perusahaan sektor perikanan, terutama pada perusahaan dengan skala menengah-kecil seperti IIKP yang stagnan di skor 26% atau fluktuasi pada ASHA, mengungkap adanya hambatan struktural. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap POJK 51/2017 bukan sekadar masalah kemauan manajerial, melainkan sangat bergantung pada kapasitas internal perusahaan dalam mengelola data non-finansial yang kompleks. Penyusunan *sustainability report* yang berkualitas menuntut adanya integrasi sistem pendataan lingkungan dan sosial yang mapan, sesuatu yang sering kali belum menjadi prioritas bagi perusahaan perikanan yang masih beroperasi dengan model bisnis tradisional.

Kendala pertama yang bersifat struktural adalah ketiadaan unit kerja khusus yang kompeten dalam isu keberlanjutan. Pada banyak perusahaan dengan skor SRDI rendah, fungsi pelaporan keberlanjutan biasanya dirangkap oleh departemen sekretaris perusahaan atau hubungan investor yang lebih berfokus pada aspek administratif dan kepatuhan legal formal. Akibatnya, pengungkapan yang dihasilkan cenderung bersifat naratif dan mengulang informasi tahun sebelumnya tanpa ada pendalaman substansi. Ketiadaan ahli lingkungan di tingkat internal menyebabkan data teknis seperti perhitungan emisi karbon dari armada kapal, intensitas energi pada pabrik pengolahan, hingga audit konservasi air dan biodiversitas laut tidak dapat tersaji secara kuantitatif.

Kendala kedua terdapat hambatan pada aspek biaya pelaporan. Bagi perusahaan dengan profitabilitas yang berfluktuasi atau skala aset yang terbatas, pengumpulan data dari rantai pasok maritim yang luas merupakan beban finansial yang signifikan. Hal ini menjelaskan mengapa poin Verifikasi Pihak Independen hampir selalu kosong pada emiten yang tidak mencapai skor 100%. Biaya untuk menyewa asuransi eksternal atau auditor independen guna memvalidasi laporan keberlanjutan dianggap sebagai biaya tambahan. Kondisi ini diperburuk dengan karakteristik operasional sektor perikanan yang memiliki ketersebaran geografis tinggi (dari kapal di laut lepas hingga pabrik di darat), sehingga sinkronisasi data operasional menjadi tantangan logistik yang mahal.

3.2.3 Implikasi terhadap Visi Ekonomi Biru dan Daya Saing Global

Fluktuasi dan rendahnya pengungkapan kinerja lingkungan dalam penelitian ini membawa implikasi serius terhadap kesiapan sektor perikanan Indonesia dalam menyongsong visi ekonomi biru (*blue economy*). Sebagai sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi maritim dengan nilai ekspor mencapai USD 6,27 miliar pada 2025, transparansi keberlanjutan bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen krusial dalam mempertahankan pangsa pasar internasional. Kekurangan perusahaan dalam menyajikan data kuantitatif mengenai intensitas emisi armada kapal dan jejak karbon operasional sebagaimana ditemukan dalam analisis kategori kinerja lingkungan dapat menjadi hambatan non-tarif yang menyebabkan produk perikanan Indonesia kehilangan daya saing.

Dalam perspektif Signaling Theory, perusahaan yang mampu mempertahankan skor SRDI 100% secara konsisten, seperti CPRO dan CRAB, berhasil mengirimkan sinyal positif yang kuat kepada investor global dan lembaga pembiayaan yang konsen terhadap lingkungan. Konsistensi ini menurunkan asimetri informasi dan membangun kepercayaan bahwa perusahaan telah mengintegrasikan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi bisnis intinya. Hal ini membuka peluang besar bagi perusahaan tersebut untuk mendapatkan akses terhadap *green financing* atau *blue bonds* dengan biaya modal yang lebih rendah. Sebaliknya, fenomena *ceremonial compliance* dan inkonsistensi pelaporan yang ditunjukkan oleh mayoritas perusahaan lain dalam penelitian ini menciptakan risiko reputasi bagi sektor perikanan nasional. Investor cenderung memberikan sentimen negatif atau melakukan divestasi pada perusahaan yang dianggap melakukan praktik *greenwashing*, yakni memberikan kesan keberlanjutan tanpa dukungan data kinerja yang kredibel.

Rendahnya tingkat pengungkapan pada aspek verifikasi eksternal merefleksikan rendahnya kualitas reliabilitas informasi keberlanjutan pada perusahaan sub-sektor perikanan. Tanpa mekanisme *assurance* yang memadai, validitas laporan dalam rantai pasok global yang menuntut transparansi penuh menjadi sulit dijustifikasi. Hal ini menimbulkan implikasi pada lemahnya posisi tawar Indonesia di pasar internasional, di mana kekayaan sumber daya maritim tidak dibarengi dengan kredibilitas pelaporan korporasi. Lebih jauh, ketidakpastian data non-finansial ini menghambat integrasi data sektor swasta ke dalam kerangka Nationally Determined Contributions nasional, sehingga kontribusi riil sektor perikanan terhadap dekarbonisasi sulit terukur secara akurat.

Secara strategis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan visi ekonomi biru yang substansial, diperlukan pergeseran paradigma yang fundamental, yakni dari kepatuhan yang bersifat simbolis menuju kepatuhan yang bersifat substantif. Perusahaan di sektor perikanan tidak boleh lagi memandang *sustainability reporting* sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif atau beban biaya tambahan (*cost center*), melainkan harus mereposisinya sebagai investasi strategis yang mampu meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Transformasi ini menuntut integrasi nilai-nilai keberlanjutan ke dalam model bisnis inti, sehingga laporan yang dihasilkan bukan hanya sekadar instrumen pencitraan, melainkan refleksi akurat dari tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab terhadap ekosistem maritim.

Lebih lanjut, konsistensi dalam pengungkapan informasi non-keuangan yang berkualitas akan menjadi determinan utama dalam memperkuat daya saing sektor perikanan Indonesia di pasar global yang semakin selektif terhadap isu-isu lingkungan. Dengan menyediakan data kinerja lingkungan yang terverifikasi dan transparan, perusahaan dapat memitigasi risiko asimetri informasi serta memperkuat legitimasi perusahaan di mata pemangku kepentingan internasional. Pada akhirnya, internalisasi prinsip ekonomi biru melalui pelaporan keberlanjutan yang kredibel akan menjadi katalisator bagi terciptanya ekosistem bisnis yang resilien, yang tidak hanya mengejar profitabilitas jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlangsungan sumber daya hayati laut bagi generasi mendatang.

4. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sub-sektor perikanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dan belum mencapai konsistensi yang ideal. Meskipun implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 berhasil

memberikan *shock effect* yang memicu peningkatan kepatuhan signifikan pada tahun 2023, fenomena ini cenderung bersifat seremonial karena beberapa emiten belum mempertahankan kualitas pelaporannya pada tahun 2024. Secara substansial, pengungkapan masih didominasi oleh informasi administratif yang bersifat normatif seperti profil perusahaan dan penjelasan direksi. Sebaliknya, indikator krusial dalam ekonomi biru, yakni kinerja lingkungan hidup yang terukur secara kuantitatif serta verifikasi dari pihak independen (*assurance*), masih sangat minim diungkapkan, yang mengindikasikan bahwa integrasi data non-keuangan ke dalam sistem pelaporan internal perusahaan masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya bagi regulator dan manajemen korporasi dalam memperkuat ekosistem pelaporan keberlanjutan di sektor maritim. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat pengawasan serta mengembangkan mekanisme evaluasi yang tidak hanya berfokus pada kelengkapan administratif, tetapi juga pada substansi dan reliabilitas data non-keuangan guna memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini harus dipandang sebagai urgensi untuk segera membangun sistem pendataan kinerja lingkungan dan sosial yang terintegrasi. Hal ini krusial untuk memitigasi risiko asimetri informasi dan memperkuat legitimasi bisnis di mata investor global, sehingga sektor perikanan nasional memiliki daya saing yang tangguh dalam menghadapi tuntutan ekonomi global yang semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang hanya mencakup satu sub-sektor serta periode pengamatan yang relatif singkat pasca-implementasi penuh regulasi. Keterbatasan data pada awal tahun 2026 juga menyebabkan kinerja pelaporan tahun buku 2025 belum dapat dianalisis secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel ke berbagai sektor maritim lainnya guna memperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai implementasi ekonomi biru di Indonesia. Selain itu, penggunaan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan regulator sangat dianjurkan untuk mengeksplorasi kendala internal dan hambatan biaya yang menyebabkan rendahnya konsistensi serta kualitas pengungkapan kinerja lingkungan di perusahaan. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan sampel ke sektor maritim lainnya serta menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam untuk mengeksplorasi kendala internal yang menyebabkan rendahnya konsistensi pengungkapan kinerja lingkungan di perusahaan.

Referensi

1. Alam, M. S., & Yousuf, A. (2024). Fishermen's community livelihood and socio-economic constraints in coastal areas: An exploratory analysis. *Environmental Challenges*, 14(September 2023), 100810. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2023.100810>
2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2024). Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia (L. A. A. T. Sambodo (ed.); 2nd ed.). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
3. Edi Suwamo, T., Nurmalina, R., Amelia, N., Suasri, E., & Izzadieny, F. (2025). Akuntansi Berkelanjutan Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Hijau Untuk Indonesia Emas2045. *Agustus*, 3(8), 3031–5220.
4. Fathia, R., Indriani, M., & Priantana, R. D. (2025). Determinan Voluntary Disclosure pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(8).
5. Indonesia, K. K. dan P. R. (2024). BIJAK MENGELOLA LAUT UNTUK EKONOMI BIRU. <https://kkp.go.id/storage/Materi/bijak-mengelola-laut-untuk-ekonomi-biru67a1d1fb9efb3/materi-67a1d1fba2841.pdf>
6. Indonesia, K. K. dan P. R. (2026). Produk Perikanan Indonesia Makin Bermilai di Pasar Internasional. <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/produk-perikanan-indonesia-makin-bernilai-di-pasar-internasional-LvAA.html>
7. Kastana Sapanli, Tridoyo Kusumastanto, Sugeng Budiharsono, A. S. (2018). Analisis Struktur Ekonomi Kelautan Indonesia Ocean Economic Structures Analysis of Indonesia. *Jurnal Mina Sains*, 4, 91–99.
8. Lindiawatie. (2025). Peran dan Dampak Pembangunan Ekonomi Kelautan terhadap Perekonomian Indonesia Pendekatan Input Output Tahun 2020. *Journal of Economics Development Issues*, 08, 35–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jedi.v8i2.404>
9. Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (p. Lampiran II). <https://www.ojk.go.id>
10. Pratama, D. A., & Tanjungpura, U. (2025). *BLUE ACCOUNTING DALAM PERSPEKTIF TEORI LEGITIMASI DAN*. 3(2), 1–16. <https://doi.org/10.26418/kiafe.v3.i2.82760>
11. Rahmayanti, A. Y., & Sari, D. K. (2023). Blue Accounting to Enhance the Quality of Sustainability Report. 69. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083069>
12. Sejati, B. P., & Prastiwi, A. (2015). PENGARUH PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT. 4, 1–12.
13. Siti Choiriah, Selva Temalagi, Lin Oktris, Sofyan Halim, H. P. M. (2025). Akuntansi Lingkungan. Salemba Empat.
14. Utomo, L. P., & Purbowati, R. (2019). Pengaruh Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Perusahaan. *SNEB : Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Dewantara*, 1(1), 55–62. <https://doi.org/10.26533/sneb.v1i1.532>
15. Warkula, Y. Z., Mediaty, & Damayanti, R. A. (2025). Application of Blue Accounting and Sustainability Accounting in Pearl Cultivation Company Commanditaire Vennootschap (CV) Mairang Jabulenga Village, Aru Islands. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e02099. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n02.pe02099>